

**STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM  
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIESA APRILIA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN**

**Oleh**

**RIESA APRILIA**

Akibat dari pencabutan subsidi premi asuransi nelayan pada periode kedua keikutsertaannya, pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis peserta program asuransi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dengan menggunakan model implementasi George Edward III yang terdiri atas komunikasi, sikap, sumberdaya dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif didasarkan pada analisis data kualitatif dengan informan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, nelayan Desa Pasar Madang, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) kecamatan Kota Agung dan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian ini Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dengan memberhentikannya subsidi Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada periode kedua setelah keikutsertaan disimpulkan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran. Nelayan kecil tidak merespon program bantuan premi asuransi nelayan ini akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang besar justru yang merespon dengan cepat program bantuan premi asuransi nelayan. Nelayan dengan penghasilan besar lebih diuntungkan dalam asuransi nelayan mandiri akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang besar tidak mampu mengikuti lanjutan program asuransi nelayan mandiri. Hasil mengenai model implementasi kebijakan George Edward III, Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan, dengan melakukan pencabutan subsidi tidak berhasil pengimplementasiannya. Dari empat variabel hanya satu variabel yang terpenuhi yaitu variabel struktur birokrasi. Sedangkan menurut Edward implementasi kebijakan akan berhasil apabila dari empat variabel dapat terpenuhi.

**Kata Kunci: Asuransi Nelayan, Perlindungan Nelayan, Implementasi Kebijakan**

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF DEPARTMENT FISHERIES TANGGAMUS DISTRICT IN THE IMPLEMENTATION PROGRAM PREMIUMS INSURANCES OF FISHERMAN**

**By**

**RIESA APRILIA**

As a result of the revocation of subsidy premiums insurances of fisherman in the second period of participation, in 2018 there was a drastic decline in insurance program participants. The purpose of this study was to analyze the implementation of the strategy of department fisheries tanggamus district in the program premiums insurances of fisherman using implementation model from George Edward III be composed of communication, attitudes, resources and bureaucratic structures. The research method used was descriptive based on qualitative data analysis with informants from Department Fisheries Tanggamus District , fishermen at Pasar Madang Village, HNSI (Indonesian Fishermen Association), Kota Agung sub-district and PT. Asuransi Jasa Indonesia Bandar Lampung Branch. The results of this study are strategy of department fisheries tanggamus district in the program premiums insurances of fisherman stopping subsidies for Premium Insurance of Fishermen in the second period after participation concluded that the program was not on target. Small fishermen not respond to the Premium Insurance of Fishermen, but large-income fishermen actually respond quickly to Premium Insurance of Fishermen. Large-income fishermen benefit more from independent fishermen insurance, but large-income fishermen cannot afford to follow up on independent fishing insurance programs. The results of the implementation model of George Edward III, in the implementation strategy of department fisheries tanggamus district in the program premiums insurances of fisherman of fishermen, by revoking subsidies were not successful implementation. Of the four variables, only one variable is fulfilled, namely the bureaucratic structure variable. Meanwhile, according to Edward, the implementation of the policy will succeed if four variables are fulfilled.

**Keywords: Fisherman Insurance, Fisherman Protection, policy implementation**

**STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM  
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN**

**Oleh Riesa Aprilia**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2019**

**Judul Skripsi**

**:STRATEGI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TANGGAMUS DALAM  
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN  
PREMI ASURANSI NELAYAN**

**Nama Mahasiswa**

**: Riesa Aprilia**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021004**

**Jurusan**

**: Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas**

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**

**NIP. 196405081993031004**

**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**

**NIP. 196007291990101001**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A black ink signature of Dr. R. Sigit Krisbintoro, written in a cursive style.

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**

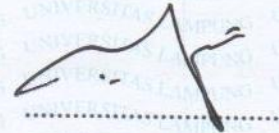
**NIP. 196112181989021001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Sekretaris

: **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**



Penguji Utama

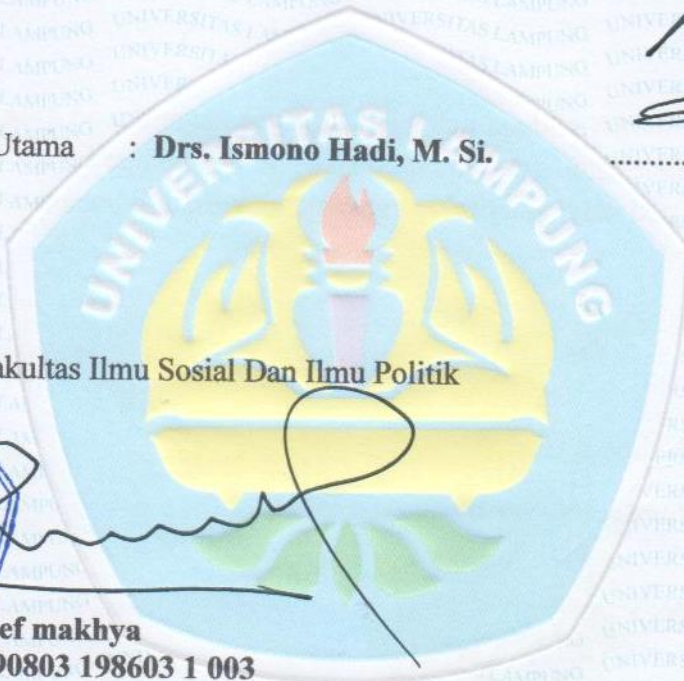
: **Drs. Ismono Hadi, M. Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif makhya**

**NIP. 19590803 198603 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Mei 2019

**Yang Membuat Pernyataan**



**Riesa Aprilia**  
**NPM. 1516021004**

Catatan :

Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

## RIWAYAT HIDUP



Riesa Aprilia, di lahirkan di Gisting Kabupaten Tanggamus pada tanggal 15 April 1997. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Solihin Indramawan dan Ibu Tapridah. Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanggamus tahun 2022-2023. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasar Madang pada tahun 2003-2009. Kemudian, melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Tanggamus pada tahun 2009-2012. Setelahnya penulis melanjutkan lagi pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Agung pada Tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), Anggota Danus Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI). Pada bulan Januari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur selama 40 Hari.



## **MOTTO**

*”Nelayan Terlindungi, Nelayan Sejahtera”*

(Bantuan Premi Asuransi Nelayan)

“Bukan Kesulitan Yang Membuat Kita Takut  
Seringkali Ketakutanlah Yang Membuat Jadi Sulit  
Jadi, Jangan Mudah Menyerah !”

(Presiden Jokowi Dodo)

*“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya  
ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka  
perbuatan itu buruk.”*

(Imam An Nawawi)

**“MANUSIA TIDAK AKAN MATI  
YANG MATI HANYA JASADNYA, KEBAIKAN DAN ILMUNYA  
TERHADAP SESAMA AKAN HIDUP SELAMANYA”**

**(Riesa Aprilia)**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**Bismillahirrahmanirrahim**

**Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.**

**Ku Persembahkan Karya Kecil ini untuk yang menyayangiku:**

### **KEDUA ORANG TUAKU**

**Mereka yang selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan do'a dalam menanti keberhasilanku**

### **KAKAK-ADIKKU TERSAYANG**

**Saudara sekaligus sahabat terbaikTerima kasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi cerita dan selalu memotivasiku untuk meraih kesuksesanku**

### **KELUARGA BESARKU**

**Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan**

**ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Esa serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “STRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sang pencipta alam semesta yang tiada satupun nikmat di dalamnya yang dapat kita dustakan, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan semua ummatnya hingga akhir zaman kelak.
2. Kedua orang tuaku Ayah Solihin Indramawan dan Ibu Tapridah yang sangat aku sayangi, cintai dan sangat aku banggakan yang rela mengorbankan istirahatnya hanya demi kepentingan anak-anaknya. ibu terimakasih untuk segala nasihat, bimbingan, waktu dan tenaganya, Rela

melakukan apa saja hanya demi anak-anaknya sukses kelak dan tidak pernah ada kata tidak ada kalau anak-anaknya meminta apapun itu. Bapak, terimakasih telah mengorbankan segala tenaga serta waktunya demi anak-anaknya yang sampai saat ini mungkin belum memberikan yang terbaik, tetapi esok pasti akan kami buktikan yah, bu. Kasih sayang serta pengorbanan kalian tidak akan pernah terbalaskan serta akan aku ingat sampai akhir hayat. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan doa Ayah dan Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian.

3. Kakek nenekku yang sangat aku cintai dan aku banggakan Hi. Sarnadi dan Hj. Rokhayah yang sudah menjadi orang tua kedua ku setelah ayah dan ibu, yang sudah banyak mengorbankan waktu istirahatnya demi aku cucu yang sangat bandel ini. Dan menjadi kakek nenek terhebat untukku. Teruntuk kakekku semoga berada di syurga-Nya Allah SWT berkumpul dengan orang-orang yang shalih dan shalihah Aamiin Allahumaamiin Al-Fatihah.
4. Kakak dan adikku Indri Oktaria S.Pd dan Salwa Nasifa Saudara sekaligus sahabat terbaikTerima kasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi cerita dan selalu memotivasiku untuk meraih kesuksesanku.
5. Alm. HI. Achmad Fuad, Bunda HJ. Siti Amini Kakak Desfa Muqsith dan Mba Asna Nursyaifiyah keluarga kedua penulis selama hidup diperantauan yang telah banyak membantu dari segi moril dan materil
6. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku pembimbing Utama. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah

banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang selalu di sampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah.
8. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. pembahas dan penguji bagi Penulis. Terima kasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si, selaku pembimbing akademik.
10. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
11. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
13. Bapak dan Ibu Staf administrasi Fisip Unila.
14. Segenap informan penelitian yang Bapak Edi Yulian S.E (Kasubbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum Dan Kepegawaian), Bapak A'an Junaidi, S.Pi, M.M (Petugas Pendamping BPAN Kabupaten Tanggamus dan Kepala Seksi Pengawasan Perairan Umum), Bapak Tobing Sutomo, A.Pi (Petugas Pendamping BPAN dan Koordinator Penyuluh perikanan), Bapak Jefri Almariski, A.Md (Penyuluh Perikanan

Kecamatan Kota Agung), Bapak Suyudi (Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kecamatan Kota Agung), Bapak Mahdis (Kepala Bidang Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia), Bapak Titus Laksa Gemilang (Marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia), dan informan nelayan Bapak Marofi, Bapak Satibi, Bapak Ahmad Syahroni, Bapak Misna, Bapak Edwin, Ibu Pengsan, Bapak Hamzah. Abang Sofyan Irwandi, S.IP yang telah membantu memudahkan segala keperluan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.

15. Mamas Joko Triyono, S.Pd atas segala kesabaran, dukungan, motivasi, doa, dan bantuan yang telah diberikan.
16. Sahabat mommy soon, Fitri Nestia S.IP, Oktadila Anwari S.IP yang selalu menjadi tempat curhat penulis akan perjuangan berskripsweet dan telah menemani kehidupan kampusku selama 3 tahun 8 bulan ini.
17. Sahabat kuku onta dan bayi tomketku Siti Khoiriyah A S.IP, Novita Anggraeni S.IP dan Nurul Era Fatmawati S.IP semoga sukses untuk kita semua
18. Teman-teman Pejabat Solehku, Redi Gumbira S.IP, Deni Andika S.IP, Riyo Pratama S.IP, Alhadad S.IP, Erdi Setiawan S.IP, Mirza Anwar S.IP, Alfayad S.IP, Lutfi Hariwibowo, S.IP, Ade Feri Anggriawan S.IP, Hadian Febrizky S.IP.
19. Sahabat Rempong Squad, Nora Fadillah Umar, Reka Wulandari, Stanilaus firman Hutawuruk, Syalila Ghina Osi Dan Mila Sari.
20. Sahabat Syurga, Yulia Uji Taba, Maulida Annisa, Rendy Andhika Dan Fakhrur Razi semoga sukses untuk kita semua

21. Teman-teman KKN Desa Lehan Kecamatan Bumi Agung, Hastin Barokah Marolina, Elisa Sijabat, Lia Putriana, Ridho Akbar, Bayu Franswijaya Dan Dede Romansyah terimakasih keluarga 40 hari penulis semoga sukses untuk kita semua. Untuk Ayah Ahmad Sobri Dan Umi Asni Arlinda terimakasih telah menjadi orangtua 40 hari kami semoga kebaikan ayah dan umi dibalas oleh Allah SWT aamiin.
22. Teman-teman Asisten Dosen Pak Piping semoga sukses untuk kita semua
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu dan banyak teman.
24. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Terima kasih untuk semuanya semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 14 Mei 2019  
Penulis

Riesa Aprilia  
NPM. 1516021004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Kegunaan Penelitian .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Mengenai Strategi .....	19
B. Tinjauan Mengenai Nelayan .....	20
C. Tinjauan Mengenai Asuransi .....	21
1. Bentuk-Bentuk Asuransi .....	22
2. Premi Asuransi .....	25
3. Polis Asuransi .....	25
D. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik .....	25
E. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan .....	26
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	26
2. Model Implementasi Kebijakan .....	27
F. Tinjauan Mengenai Program Premi Asuransi .....	37
a. Tujuan pemberian BPAN .....	38
b. Persyaratan NP-BPAN .....	38
c. Tata Kelola Pencairan Dana BPAN .....	39
d. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan .....	44
e. Mekanisme Proses Klaim Bantuan Premi Asuransi Nelayan .....	45
f. Penanganan Tuntutan .....	47
g. Keputusan Tuntutan/Klaim .....	48
h. Pembayaran Tuntutan/Klaim .....	48
G. Kerangka Pikir .....	49



<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	55
C. Fokus Penelitian .....	55
D. Jenis Data .....	57
E. Penentuan Informan .....	59
F. Teknik Pengumpulan Data .....	62
G. Teknik Pengolahan Data .....	65
H. Teknik Analisis Data .....	67
I. Teknik Keabsahan Data .....	68
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus .....	71
1. Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perikanan .....	71
2. Visi dan Misi Dinas Perikanan .....	80
3. Kadaan Pegawai .....	81
B. Gambaran Umum Desa Nelayan Pasar Madang .....	82
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
1. Hasil Model Implementasi George Edward III .....	85
A. Komunikasi ( <i>Communication</i> ) .....	85
a. Sosialisasi Mengenai Pencabutan Subsidi Bantuan Premi Asuransi Nelayan Diperiode Kedua Keikutsertaan .....	86
b. Media Penyampaian Informasi .....	90
c. Kejelasan Isi Pesan .....	93
d. Respon Nelayan Terhadap BPAN .....	94
B. Sumber Daya (Resources) .....	99
a. Standar Operasional (Sop) Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan .....	100
b. Evaluasi Program .....	102
c. Pendidikan Dan Keterampilan Nelayan .....	106
d. Pendapatan Nelayan Per-Hari .....	108
e. Anggaran .....	109
C. Sikap ( <i>Despostions Atau Attitudes</i> ) .....	113
a. Aspek Pemerintah .....	113
b. Aspek Masyarakat .....	114
D. Struktur Birokrasi .....	118
a. Kelebihan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Program Dari Pusat Ke Daerah .....	119
b. Hubungan Kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dengan Jasindo .....	121
c. Klaim Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan .....	126

2. Hasil Model Implementasi George Edward III .....	134
A. Komunikasi .....	134
B. Sumberdaya .....	135
C. Sikap .....	136
D. Struktur Birokrasi .....	137
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>152</b>
A. Simpulan .....	152
B. Saran .....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>158</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel</b>	
1. Tabel Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2016 .....	5
2. Tabel Total Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 .....	5
3. Tabel Bantuan Premi Asuransi Nelayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 .....	7
4. Tabel Jumlah Desa Pesisir Kabupaten Tanggamus .....	8
5. Tabel Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung .....	10
6. Perubahan Status Kemajuan Desa Tahun 2014 Dan 2017 Menurut Kabupaten/Kota .....	11
7. Tabel penelitian terdahulu .....	16
8. Tabel Daftar Informan .....	61
9. Tabel Jumlah Penduduk Dan Profesi Di Desa Pasar .....	87
10. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Laut Desa Pasar Madang Tahun 2018 .....	82
11. Tabel Jumlah Jenjang Pendidikan Terakhir Nelayan Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 .....	111
12. Tabel Nilai Manfaat Per Orang Penerima Klaim Asuransi Sesuai Kejadian Yang Dialami .....	127
13. Tabel Data Nilai Manfaat Per Orang Penerima Klaim Asuransi Sesuai Pembatasan Usia (Kematian Alami) .....	127

14. Tabel Klaim Premi Asuransi Nelayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 .....	130
15. Tabel Klaim Premi Asuransi Nelayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 .....	130
16. Tabel 16. Daftar Penghasilan Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Kapal Jenis Motor Payang (10 GT) .....	139
17. Daftar Penghasilan Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Kapal Jenis Pancing (Tanpa Motor) .....	140
18. Tabel 18. Daftar Penghasilan Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Kapal Jenis Jaring Rampus (5 GT) .....	140
19. Daftar Penghasilan Nelayan Berdasarkan Kepemilikan Kapal Jenis Jaring Kambang (5 GT) .....	141
20. Tabel Triangulasi Model Implementasi George Edward III .....	144

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar</b>	
1. Gambar Kerangka Pikir .....	51
2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus .....	79
3. Gambar Struktur Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan Lapangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 .....	111
4. Gambar Daftar Hasil Lelang Nelayan Kecamatan Kota Agung Tahun 2018 .....	112
5. Gambar Struktur Birokrasi Komunikasi Pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Di Kabupaten Tanggamus .....	118
6. Gambar Sosialisasi BPAN Yang Dilaksanakan Jasindo Dan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 .....	123
7. Gambar Brosur BPAN Dari Jasindo .....	124
8. Gambar Peneliti Membantu Petugas One Data Dalam Proses Penginputan Data Tentang Jenjang Pendidikan Terakhir Nelayan Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 .....	124
9. Gambar Hasil Tangkapan Layar Percakapan Antara Pihak Petugas Pendamping Dengan Pihak Jasindo Mengenai Pencairan Dana Santunan Milik Bapak Marofi .....	125
10. Gambar Bapak Hamzah Nelayan Yang Pernah Melakukan Klaim Asuransi Tahun 2017 .....	131
11. Bapak Marofi Nelayan Yang Pernah Melakukan Klaim Premi Asuransi Nelayan Tahun 2018 .....	132

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nelayan merupakan salah satu profesi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di laut. Usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, hal ini mengakibatkan kontinuitas hasil produksi tidak terjamin. Skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktivitas usaha yang rendah. Selain itu, profesi nelayan memiliki risiko yang cukup tinggi, yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan. Saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan seringkali dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat hingga mengakibatkan kecelakaan, dan seringkali terjadi tabrakan di laut.

Terkait pentingnya perlindungan bagi pekerjaan nelayan, Pemerintah telah membawa angin segar karena telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petani Garam. Undang-Undang tersebut, lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari risiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak

seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran.

Perlindungan dalam upaya mensejahterakan nelayan merupakan salah satu program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan penambak garam. BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan meningkatnya kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Indonesia. Adam (2015: 147) mengatakan bahwa :

“Nelayan dan pembudi daya ikan dibedakan dalam beberapa literatur. Secara umum, Nelayan didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, sedangkan pembudi daya ikan didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dalam lingkungan terkontrol.”

Bantuan premi asuransi nelayan ini, merupakan bantuan kementerian kelautan dan perikanan yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) yang di peruntukkan untuk nelayan yang pergi melaut baik nelayan kecil dan nelayan tradisional. Jaminan perlindungan untuk pembudi daya ikan sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan

kecil. Program tersebut merupakan kerjasama antara KKP dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia/Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Premi asuransi nelayan ini merupakan salah satu jenis Asuransi jiwa karena program ini bertujuan untuk menanggung kerugian atas terjadinya kecelakaan dilaut yang terjadi dengan nelayan. Asuransi jiwa adalah salah satu asuransi yang penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu salah satu asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau terlalu lama.

Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-Djpt/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tujuan pemberian BPAN sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang
- b. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi
- c. Membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri demi terwujudnya masyarakat yang mandiri
- d. Memberikan bantuan bagi ahli waris
- e. Memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak Asuransi.



Program bantuan premi asuransi nelayan merupakan program pemerintah yang hanya berlaku satu tahun setelah keikutsertaan. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tidak lagi bisa melakukan pengusulan asuransi gratis setelah nelayan mengikuti program premi asuransi di periode pertama.. Namun pemerintah menggulirkan asuransi berbayar dari Jasindo yang sifatnya mandiri dengan nilai premi Rp 175 ribu per tahun untuk tiap nelayan. bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) yang pernah digulirkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan secara gratis hanya berlaku selama satu tahun atau satu periode untuk tiap nelayan. Apabila masa berlaku asuransi sudah habis, maka nelayan boleh ikut asuransi secara mandiri dari Jasindo.

Nelayan yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai peserta premi asuransi nelayan di tahun pertama wajib mendaftarkan dirinya kembali ditahun berikutnya secara online dan membayarkan preminya langsung ke Jasindo melalui rekening dan buku tabungan. Apabila nelayan tidak mendaftarkan dirinya kembali maka nelayan tersebut dinyatakan bukan sebagai peserta premi asuransi nelayan. Bantuan premi asuransi nelayan diperuntukkan oleh seluruh nelayan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Provinsi Lampung. Tahun 2016, nelayan yang sudah diusulkan untuk menerima bantuan premi asuransi nelayan berjumlah 2.857 dan total nelayan yang terverifikasi adalah 1.042. berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Provinsi Lampung Tahun 2016**

No	Nama Kabupaten	Total Usulan	Total Terverifikasi BPAN	Persentase
1	Pesisir Barat	547	382	69,9%
2	Lampung Selatan	0	0	0%
3	Lampung Tengah	40	5	12,5%
4	Lampung Timur	0	0	0%
<b>5</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>1.101</b>	<b>315</b>	<b>28,6 %</b>
6	Tulang Bawang	0	0	0 %
7	Bandar Lampung	220	119	54,1 %
8	Pesawaran	371	292	78,7 %
9	Tulang Bawang Barat	572	29	5,06 %
	<b>Total</b>	<b>2.857</b>	<b>1.042</b>	

Sumber : <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/12/PROGRAM-BANTUAN-PREMI-ASURANSI-BAGI-NELAYAN-TAHUN-2016.pdf>. Diakses pada 3 september 2018 pukul 20. 20 WIB

Program bantuan premi asuransi nelayan di Provinsi Lampung, jika dilihat pada tahun 2016 kabupaten tertinggi yang mengikuti program premi asuransi nelayan adalah Kabupaten Tanggamus dengan total usulan 1.101 dan yang terverifikasi berjumlah 315 nelayan dan kabupaten terendah adalah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan dengan total 0 nelayan.

**Tabel 2. Total Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Se-Provinsi Lampung Tahun 2017**

No	Nama Kabupaten	Pembagian Tahapan	Jumlah	Total Keseluruhan
1	Lampung Timur	Tahap 3	3388	3.388
2	Pesisir Barat	Tahap 3	785	885
		Tahap 7	48	
		Tahap 9	52	
3	Lampung Selatan	Tahap 4	365	633
		Tahap 9	135	
		Tahap 14	133	
4	Tulang Bawang	Tahap 6	370	693
		Tahap 10	232	
		Tahap 16	91	
5	Lampung Tengah	Tahap 6	16	484
		Tahap 7	57	
		Tahap 13	11	
6	Mesuji	Tahap 6	53	197
		Tahap 10	144	
7	Pringsewu	Tahap 6	54	54
8	Tanggamus	<b>Tahap 5</b>	<b>584</b>	<b>954</b>
		<b>Tahap 7</b>	<b>118</b>	
		<b>Tahap 8</b>	<b>232</b>	
		<b>Tahap 13</b>	<b>20</b>	

9	Way Kanan	Tahap 6	77	77
10	Pesawaran	Tahap 9	374	925
		Tahap 13	340	
		Tahap 14	211	
11	Tulang Bawang Barat	Tahap 9	242	642
		Tahap 13	383	
		Tahap 16	17	
12	Lampung Utara	Tahap 16	64	64
Total keseluruhan penerima program bantuan premi asuransi Nelayan di Provinsi Lampung pada tahun 2017				8.996

Sumber: <http://www.djpt.kkp.go.id/read/daftar-penerima-bantuan-premi-asuransi-nelayan-tahun-2017>. Diakses pada 3 september 2018 pukul 22.20 WIB

Tahun 2017 bantuan premi asuransi nelayan terbagi menjadi 16 tahapan. Untuk Provinsi Lampung sendiri, terbagi menjadi 9 tahapan untuk pembagian program bantuan premi asuransi nelayan yaitu pada tahapan 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16. Tahun 2017, kabupaten tertinggi yang mengikuti program asuransi nelayan adalah Kabupaten Lampung timur dan tertinggi kedua adalah Kabupaten Tanggamus, serta kabupaten terendah yang mengikuti program asuransi nelayan adalah Kabupaten Pringsewu. Peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Tanggamus karena Tanggamus merupakan kabupaten dengan total usulan premi asuransi nelayan tertinggi pertama pada tahun 2016 dengan total usulan 1.101 dan terverifikasi 315 serta tertinggi kedua pada tahun 2017. Berikut jumlah peserta bantuan premi asuransi nelayan tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus.

**Tabel 3. Bantuan Premi Asuransi Nelayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pematang Sawa	10
2	Semaka	-
3	Bandar Negeri Semuong	-
4	Wonosobo	-
5	Kota Agung Barat	16
6	Kota Agung	7
7	Kota Agung Timur	-
8	Gisting	-
9	Gunung Alip	-
10	Sumberejo	-
11	Ari Nanningan	53
12	Pulau Panggung	-
13	Ulu Belu	-
14	Talang Padang	-
15	Pugung	-
16	Bulok	-
17	Limau	29
18	Cukuh Balak	63
19	Kelumbayan Barat	-
20	Kelumbayan	12
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>190</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus (2019)

Pada tabel 3 tentang bantuan premi asuransi nelayan pada tahun 2018 menjellaskan bahwa peserta bantuan premi asuransi nelayan pada tahun 2018 berjumlah 190 nelayan. Pada jumlah ini mengalami penurunan dari jumlah bantuan premi asuransi nelayan tahun 2017 berjumlah 954 dan pada tahun 2018 hanya 190 nelayan dan 7 diantaranya dari kecamatan Kota Agung.

Asuransi nelayan mandiri baru berlaku pada tahun 2017-2018 dengan total 120 peserta. Padahal jumlah peserta bantuan premi asuransi nelayan pada dari tahun 2016/2017 hingga 2017/2018 berjumlah 1.269 nelayan akan jumlah peserta asuransi mandiri pada tahun 2018 berjumlah 120. Jadi hanya 9% dari total peserta bantuan premi asuransi nelayan yang mengikuti asuransi nelayan mandiri. Sedangkan tujuan dikeluarkannya bantuan premi

asuransi nelayan adalah Membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri demi terwujudnya masyarakat yang mandiri.

**Tabel 4. Jumlah Desa Pesisir Kabupaten Tanggamus**

No	Kecamatan	Pekon	Jumlah Nelayan	Jumlah KUB	Jumlah Yang Memiliki Kartu Nelayan
1	Limau	Tegineneng	523	38	395
		Badak	257	15	93
		Banjar Agung	29	2	22
		Tanjung Jaya	193	8	63
		Padang Ratu	37	3	43
		Ketapang	58	5	57
Jumlah			1097	71	673
2	Kota Agung	<b>Pasar Madang</b>	<b>1225</b>	<b>98</b>	<b>814</b>
		<b>Kusa</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
		<b>Kapuran</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
		<b>Negeri Ratu</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
		<b>Baros</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>29</b>
		<b>Terbaya</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>Jumlah</b>			<b>1357</b>	<b>107</b>	<b>890</b>
3	Kota Agung Timur	Suka Banjar	24	2	16
		Karta	10	1	7
Jumlah			34	3	23
4	Kota Agung Barat	Way Gelang	60	5	68
		Tanjung Agung	134	12	115
		Teba Bunuk	20	2	23
		Tala Gening	30	3	45
Jumlah			244	22	251
5	Wonosobo	Karang Sari	10	1	13
		Karang Anyar	110	11	122
Jumlah			120	12	135
6	Cukuh Balak	Tengor	10	1	20
		Way Rilau	30	3	42
		Pekon Doh	20	2	24
		Kuta Kakhang	10	1	16
		Suka Banjar	20	2	20
		Sawang Balak	20	2	25
Jumlah			110	11	147
Penerima BPAN			856		

Tabel 4. (Lanjutan)

1	2	3	4	5	6
7	Pematang Sawa	Guring	70	7	49
		Kampung Baru	40	4	59
		Kaur Gading	20	2	22
		Tanjungan	60	6	52
		Karang Brak	40	4	38
		Tampang Muda	60	6	52
		Tampang Tua	60	6	38
		Way Nipah	180	18	207
		Teluk Brak	130	13	109
		Tirom	80	8	50
		Martanda	30	3	30
		Betung	40	4	29
		Way Asahan	30	3	27
Jumlah			840	84	762
8	Kelumbayan	Penyandingan	114	9	59
		Paku	124	11	93
		Kiluan Negeri	126	12	84
		Umbar	72	6	35
9	Semaka	Karang Rejo			
		Kaca Pura			
		Tugu Papak			
Jumlah			436	38	271
Jumlah Rumah Tangga Perikanan			4238	348	3152
Jumlah Nelayan Kabupaten Tanggamus			5094		3152
Penerima BPAN			856		

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus (2018)

Pada tabel 3 dan 4 tentang Jumlah Desa Pesisir Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa jumlah nelayan terbanyak ada di Kecamatan Kota Agung dengan total 1357 nelayan. Dengan jumlah nelayan terbanyak di Desa Pasar Madang dengan jumlah nelayan 1225.

Pola pengembangan penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Tanggamus masih menggunakan pola penangkapan ikan secara tradisional dengan metode usaha secara turun temurun. Hal ini dikarenakan selain belum dimanfaatkannya aspek-aspek teknologi, sarana dan prasarana

perikanan, kurangnya pembinaan/penyuluhan bagi nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan sehingga hasil tangkapannya tidak terlalu melimpah dan kurang memiliki nilai ekonomis penting dan menyebabkan penghasilan nelayan masih rendah bisa dikatakan bahwa profesi seorang nelayan diidentikkan dengan masyarakat miskin. Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten di Provinsi Lampung dengan angka kemiskinan tinggi dapat dilihat dengan beberapa tabel sebagai berikut.

**Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.**

No	Nama Kabupaten/kota	2014	2015	2016
1	Lampung Barat	5,59	5,29	5,01
<b>2</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>5,89</b>	<b>5,50</b>	<b>5,18</b>
3	Lampung Selatan	5,81	5,37	5,22
4	Lampung Timur	2,87	4,60	4,20
5	Lampung Tengah	5,68	5,38	5,61
6	Lampung Utara	5,79	5,43	5,10
7	Way Kanan	5,65	5,27	5,14
8	Tulang Bawang	5,52	5,02	5,42
9	Pesawaran	5,59	5,11	5,07
10	Pringsewu	5,74	5,22	5,04
11	Mesuji	5,69	5,23	5,10
12	Tulang Bawang Barat	5,48	5,35	5,27
13	Pesisir Barat	5,09	4,93	5,31
14	Bandar Lampung	6,91	6,32	6,43
15	Metro	6,13	5,85	5,90
16	Provinsi	5,08	5,13	5,15

Sumber: <http://bappeda.tanggamus.go.id/wp-content/uploads/2018/02/RAPAT-KOORDINASI-USULAN-SIMILARAS-2019-1.pdf> diakses pada 3 november 2018 pukul 11.38 WIB

Pertumbuhan ekonomi disebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami penurunan, kecuali Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar (6,43%) dan terendah di Lampung Timur (4,20%). Pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Lampung dicapai oleh Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah,

Tulang Bawang , Peisir Barat, Tuba Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus.

**Tabel 6. Perubahan Status Kemajuan Desa Tahun 2014 dan 2017 Menurut Kabupaten/Kota**

No	Nama Kabupaten/ Kota	Kondisi Desa Tertinggal 2014	Kondisi Status Desa 2017			
			Maju	Berkembang	Kurang Berkembang	Tertinggal
1	Lampung Barat	38	0	5	14	19
<b>2</b>	<b>Tanggamus</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>28</b>
3	Lampung Selatan	13	0	5	5	3
4	Lampung Timur	2	0	0	2	0
5	Lampung Tengah	8	0	2	3	3
6	Lampung Utara	48	0	10	28	10
7	Way Kanan	28	0	4	15	9
8	Tulang Bawang	18	0	0	10	8
9	Pesawaran	20	1	5	11	3
10	Pringsewu	4	0	0	3	1
11	Mesuji	31	1	4	17	9
12	Tulang Bawang Barat	13	0	4	6	3
13	Pesisir Barat	56	1	8	24	23
14	Bandar Lampung	1	0	1	0	0
Jumlah		380	5	70	186	119

Sumber:<http://bappeda.tanggamus.go.id/wp-content/uploads/2018/02/RAPAT-KOORDINASI-USULAN-SIMILARAS-2019-1.pdf> diakses pada 3 November 2018 pukul 14.08 WIB

Desa Tertinggal yang tertinggi pada tabel di atas diduduki oleh Kabupaten Tanggamus yaitu 28 desa tertinggal pada tahun 2017. Radar Tanggamus (2018) mengemukakan bahwa:

“Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkab Tanggamus. Saat ini persentase kemiskinan di Tanggamus mencapai 13,25 persen atau berada di peringatan 11 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Menurut Kepala Bappeda Tanggamus Hendra Wijaya Mega persentase jumlah kemiskinan di Tanggamus tahun 2017 berdasar data dari BPS Tanggamus sebesar 14,25 persen, kemudian di awal tahun 2018 turun menjadi 13,25



persen. “Untuk mengentaskan kemiskinan di Tanggamus ini perlu kerja keras antar stake holder. Targetnya selama dua tahun kedepan kemiskinan di Tanggamus turun diangka 11 persen atau peringkat ke 8 dari 15 kabupaten/kota, “kata Hendra.

Desa Pasar Madang banyak terdapat tempat pengolahan ikan asin. Pengolahan ikan asin tersebut merupakan milik perorangan bukan milik kelompok usaha bersama. Hasil Pra- riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mewawancarai ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kecamatan Kota Agung, beliau mengatakan bahwa untuk Desa Pasar Madang sendiri tidak ada kelompok usaha bersama akan tetapi milik pribadi. Awal tahun 2015 berdiri kelompok tani nelayan yang bergerak dibidang budidaya rumput laut akan tetapi, pada akhir tahun 2015 usaha ini mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya kelompok tani nelayan dibubarkan. Hingga saat ini tidak ada kelompok usaha bersama maupun kelompok tani nelayan di Desa Pasar Madang.

Nelayan di Desa Pasar Madang merupakan nelayan tangkap kecil, tradisional dan buruh nelayan sehingga hasil tangkapan mereka tidak maksimal. Bulan purnama tiba terdapat banyak pengangguran musiman. nelayan di Desa Pasar Madang masih percaya dengan adanya mitos bahwa pada saat terang bulan ikan di laut tidak akan muncul sehingga pada saat terang bulan atau bulan purnama tiba nelayan di desa ini menganggur karena tidak adanya pekerjaan lain yang mereka kerjakan karena keahlian mereka adalah menangkap ikan dilaut saja. Jumlah KK (Kepala Keluarga Miskin) miskin di desa pasar madang adalah 1022 dari total kk keseluruhan

di Desa Pasar Madang adalah 1677. Artinya adalah di Desa Pasar Madang mayoritas penduduknya adalah masyarakat miskin.

Adam (2015:146) menyatakan bahwa nelayan identik dengan ketidakberdayaan. Adapun ketidakberdayaan tersebut meliputi

1. Risiko ketidakpastian sangat besar khususnya terkait dengan perubahan lingkungan
2. Dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan hidupnya, utamanya adalah perdagangan bebas
3. Situasi keamanan laut sering menghantui.

Asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap nelayan dan pengasilannya diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan jaminan keselamatan kepada nelayan. Kenyataannya masih banyak nelayan yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota premi asuransi nelayan. Premi asuransi pada tahun 2016 dan 2017 nelayan berbondong-bondong mendaftarkan dirinya sebagai peserta premi asuransi nelayan. Akan tetapi lambat tahun jumlah peserta asuransi semakin menurun pada tahun 2018 sebanyak 190 nelayan yang mengikuti program bantuan premi asuransi nelayan 7 diantaranya dari Kecamatan Kota Agung.

Nelayan yang telah mengikuti program bantuan premi asuransi secara gratis pada tahun 2016 dan 2017 harus mendaftarkan diri kembali di tahun 2018 ini untuk dapat mengikuti program premi asuransi secara mandiri. Nelayan Desa Pasar Madang belum ada yang mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi secara mandiri. Tahun 2018 ini, Kementerian Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia sudah menargetkan bahwa untuk Kabupaten Tanggamus 2000 nelayan mendapatkan program asuransi nelayan.

Kusnadi (2007:14) menyatakan bahwa program asuransi merupakan program yang harus diikuti oleh nelayan karena program asuransi sebagai tulang punggung jaminan sosial nelayan. Kusnadi beralasan sebagai berikut:

1. Kegiatan melaut adalah kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memprediksi jumlah pendapatan yang dibawa pulang
2. Investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang besar sehingga dibutuhkan biaya yang besar pula, misalnya untuk operasional, rekrutmen nelayan buruh, dan pemeliharaan alat tangkap
3. Kegiatan melaut sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan badan
4. Kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusianya rendah jika dilihat dari rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya.

Masyarakat nelayan di Desa Pasar Madang merupakan nelayan tradisional sebagian besar umumnya masih didominasi usaha berskala kecil teknologi sederhana, sangat dipengaruhi irama musim dan hasil produksinyapun terbatas, kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Suhartini (2005:35) menyatakan bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal seperti keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses

dan menguasai teknologi modern dan memiliki modal yang tidak cukup sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan nelayan tradisional.

Faktor eksternal yang dialami oleh nelayan, seperti makin terbatasnya sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif dan keadaan infraskruktur pelabuhan yang tidak mendukung. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah seberapa besar kemanfaatan program bantuan premi asuransi serta pandangan masyarakat akan pentingnya program bantuan premi asuransi nelayan. Program bantuan premi asuransi nelayan salah satu hak seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran. Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang jaminan keselamatan nelayan dan bantuan premi asuransi yang sesuai dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	M.Fariz Fadillah	2017	Skripsi	Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul
2	Mufti Sari	2017	Tesis	Implementasi Program Asuransi Nelayan Di kota Pariaman
3	Marnia Rani	2016	Jurnal	Insurance for fisherman
4	Lukman Adam	2015	Jurnal	Telaah Kebijakan Perlindungan dan Pembudi daya Ikan di Indonesia
5	Refiananda Maulana Hanif	2018	Skripsi	Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan Di Kabupaten Tanggamus

Sumber : Diolah Peneliti, (2018)

Berdasarkan tabel 9 tentang penelitian terdahulu, peneliti pertama fokus penelitiannya adalah mengenai pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan melalui bantuan premi asuransi di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian yang kedua fokus penelitiannya adalah Implementasi program asuransi nelayan di kota Pariaman dengan menggunakan model konsep George C. Edward dengan melihat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Penelitian yang ketiga fokus penelitiannya mengenai peran penting asuransi dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan, baik itu perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, cuaca buruk, sakit, ataupun buruknya kualitas ikan yang didapat, sehingga mengakibatkan kerugian dan kehilangan pendapatan bagi nelayan. Penelitian yang keempat fokus

penelitiannya mengenai telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan di Indonesia. Penelitian kelima fokus penelitiannya menggunakan model implementasi Van Meter and Van Horn.

Penelitian ini yang membedakan dari penelitian terdahulu menggunakan Model implementasi Menurut George C Edward III untuk mengetahui Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program premi asuransi dengan melakukan pencabutan subsidi premi yang dilakukan di periode kedua yang dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : *Communication, Resources, Dispotitions And Bureaucratic Structure*. Berdasarkan permasalahan di atas, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian seperti apa Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan tentang strategi program, khususnya mengenai pelaksanaan premi asuransi nelayan
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta sebagai sumber informasi awal bagi peneliti-peneliti yang tertarik pada strategi program yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa implementasi program bantuan premi asuransi dalam pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Mengenai Strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, *Strategos* ( *Stratos* artinya militer dan *Ag* artinya memimpin ) yang berarti *Generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswitz. Maka tidak mengherankan apabila strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Apabila istilah strategi digunakan pertama kali dalam dunia militer.

Mardikanto, (2015:167) mengemukakan bahwa strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. Porter (Yunus, 2016:12) mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai-nilai yang unik. Arthur A.J. (Yunus, 2016:12) mengatakan bahwa strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Berdasarkan definisi-definisi beberapa ahli, bahwa strategi adalah suatu cara atau langkah terbaik



untuk menetapkan dan menjalankan cara-cara terbaik tersebut untuk dapat hasil yang terbaik dan mencapai suatu keberhasilan.

## **B. Tinjauan Nelayan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 menyatakan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, nelayan terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, nelayan perorangan. nelayan buruh merupakan nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan juragan merupakan nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain dan nelayan perorangan merupakan nelayan yang alat tangkapnya milik sendiri dan dioperasikan dengan nelayan itu sendiri.

Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat NCP-BPAN adalah nelayan yang telah memiliki kartu nelayan/kartu KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Nelayan penerima bantuan premi asuransi nelayan yang selanjutnya

disingkat NP-BPAN adalah nelayan yang ditetapkan sebagai penerima BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan).

### **C. Tinjauan Mengenai Asuransi**

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 1992 asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Salim (2007:1) menyatakan bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, maka asuransi merupakan orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk dimasa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.

## 1. Bentuk-Bentuk Asuransi

Salim (2007:2) menyatakan bahwa bentuk-bentuk asuransi dapat digolongkan sebagai berikut :

- I. Asuransi kerugian (asuransi umum) yaitu mengenai hak milik, kebakaran dll.
- II. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian)
- III. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat dll.

John H. Magee (Salim, 2007:2) mengklasifikasikan asuransi sebagai berikut:

### I. Jaminan sosial (*Social Insurance*)

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya. Bentuk ini dilaksanakan dengan paksa, misalnya memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulannya.

### II. Asuransi sukarela (*Voluntary*)

Bentuk asuransi ini dijalankan dengan sukarela jadi tidak ada paksaan seperti jaminan sosial. Setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dalam dua jenis yakni:

- a. *Government insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan.
- b. *Commercial insurance*, yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah komersial dengan motif keuntungan. *Commercial insurance* dapat digolongkan pula kepada:
  - i. Asuransi jiwa (*Personal Life Insurance*)  
Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.
  - ii. Asuransi kerugian  
Bentuk ini sama dengan asuransi umum di Indonesia. Bertujuan untuk memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut dll.

Pada hakikatnya hukum perasuransian sudah sangat kental di telinga masyarakat Indonesia. Indonesia sudah banyak perusahaan-perusahaan dibidang asuransi yang dikembangkan, baik itu perusahaan asuransi dalam negeri maupun perusahaan asuransi dari luar negeri. Sehingga istilah perasuransian sudah menjelma menjadi bahasa keseharian masyarakat nusantara.

Berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Juncto Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Fadhllilah, 2017:23) yaitu:

- I. Asuransi kerugian (*non life insurance*), yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggalan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- II. Asuransi jiwa (*life insurance*), perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- III. Reasuransi (*reinsurance*), yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.

Premi asuransi nelayan ini merupakan salah satu jenis asuransi jiwa karena program ini bertujuan untuk menanggung kerugian atas terjadinya kecelakaan dilaut yang terjadi dengan nelayan. Asuransi jiwa adalah salah satu asuransi yang penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu salah satu asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau terlalu lama.

## 2. Premi Asuransi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

## 3. Polis asuransi

Polis asuransi adalah perjanjian yang menjadi dasar perikatan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung, dalam polis dijelaskan:

- a. Luas jaminan pertanggungan
- b. Hal-hal atau resiko yang tidak dijamin atau dikecualikan.
- c. Persyaratan umum dan persyaratan khusus.

## D. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik

Eystone (Wahab, 2016:13) menyatakan kebijakan publik ialah the *relationship of governmental unit to its environment* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Wilson (Wahab, 2016:13) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi.

Dye (Wahab, 2016:14) menyatakan kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian kebijakan publik selanjutnya dikemukakan oleh Laswell (Wahab, 2016:15) yaitu rencana program yang bertujuan, bernilai, dan bisa dipraktikan. Berdasarkan pendapat dari keempat ahli tentang konsep kebijakan publik, maka kebijakan publik merupakan tindakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah yang dapat berupa sebuah Undang-Undang, Peraturan, program-program guna untuk mengatasi masalah publik.

## **E. Tinjauan Mengenai Implementasi Kebijakan**

### **1. Konsep Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2016:135) menyatakan implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individual, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2016:135) menyatakan bahwa implementasi merupakan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadmnistrasikannya maupun menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Wahab (2016:136) menyatakan implemenasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan tertentu yang dikehendaki.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka konsep implementasi kebijakan merupakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, berdasarkan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian masyarakat. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

## 2. Model Implementasi Kebijakan

Ahli kebijakan mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. Untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Banyak model- model yang diajukan oleh para ahli namun disini hanya dijelaskan sedikit tentang model-model yang



cenderung baru dan banyak mempengaruhi berbagai pikiran dan tulisan para ahli. Model-model tersebut antara lain :

a. Teori Implementasi Kebijakan (1975-1980)

Kategori Implementasi luas berupaya mengembangkan teori (*analytical framework*) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terwujud atau tidak terwujudnya tujuan kebijakan yang telah digariskan. Pekerjaan akademis yang dilakukan dalam area ini, yang kemudian hari dikenal dengan istilah pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

Logika dalam pendekatan *top down* selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah atau (pusat) dan kemudian mempersoalkan hal-hal berikut.

- 1). Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran sejalan/konsisten dengan tujuan serta prosedur di dalam keputusan kebijakan.
- 2). Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program/proyek/aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan.
- 3). Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluaran (*Output*) dan dampak (*Impact*) kebijakan, baik yang relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan.

- 4). Bagaimana kebijakan di reformulasikan dari waktu ke waktu sejalan dengan pengalaman yang diperoleh.

Pergulatan pemikiran akademis pertama untuk mengembangkan model *top down* telah di lakukan oleh dua pakar kebijakan, Donal Van Meter dan Cal Van Horn (Wahab, 2016:164) model mereka yang di sebut dengan istilah *a model of the policy implementation process* (Model proses implementasi kebijakan). Van Meter dan Van Horn diteori mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses Implementasi akan dipengaruhi oleh sikap kebijakan yang akan dilaksanakan. Keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*Performance*).

Kedua ahli di atas adalah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*Independen variabel*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas yang di maksud ialah :

- 1). Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2). Sumber-sumber kebijakan
- 3). Cri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
- 4). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5). Sikap para pelaksana.
- 6). Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

#### b. Syarat Implementasi Kebijakan

Masih tergolong model *top-down* lainnya ialah model implementasi yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn (Wahab, 2016:167)

Menurut kedua pakar ini, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*Perfect Implementation*) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- i. Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
- ii. Pelaksanaan Program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- iii. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- iv. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- v. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- vi. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- vii. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- viii. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

#### c. Model Implementasi Menurut George C Edward III

Ekowati (2005:35) menyatakan dalam studi implementasi yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang syarat agar implementasi kebijakan berhasil, sarana utama implementasi kebijakan dapat berhasil.

Empat bagian mendatang akan dipaparkan jawaban terhadap pertanyaan penting tersebut dengan pertimbangan 4 (empat) faktor penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispostions* atau *attitudes* (sikap) dan *bureucratic structure* (struktur birokrasi).

Empat faktor dilaksanakan secara silmutan dan antar hubungan satu dengan lainnya, penekatan ideal akan mencerminkan kekomplekannya melalui diskusi secara menyeluruh. Meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan, harus menyederhanakan pengertian dan dilakukan secara *breakdown* (diturunkan) melalui ekspalanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi setiap kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi banyak variabel yang masing-masingnya memiliki tujuan antara lain :

1. Melihat bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi
2. Menjelaskan mengapa faktor-faktor yang muncul sebagai sarana implementasi kebijakan

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Tidak cukupnya komunikasi juga memberikan implementor dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan-tindakan spesifik. Kebijaksanaan ini tidak akan diperlukan melatih pencapaian

tujuan pembuat keputusan aslinya. Intruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Arahan yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

## 2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan masalah bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Personel atau aktor bertanggung jawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif.

Pentingnya sumber daya meliputi: ukuran staff dan dengan perlu keahlian, informasi relevan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (meliputi bangunan, sarana dan prasarna tanah dan *supply*) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayan tidak akan dapat diberikan dan peraturan-peraturan tidak dapat dikembangkan.

## 3. Disposisi atau sikap

Disposisi atau siap merupakan faktor krusial ketiga pada pendekatan dari studi implementasi kebijakan publik. Implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya harus pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka harus juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan. Banyak implementor melatih mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk membebaskan diri dari superior utamanya yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kekomplekan kebijakan itu sendiri.

Cara implementasi kebijakan melatih kebijaksanaannya, tergantung pada bagian besar atau disposisinya ke arah kebijakan. Sikapnya akan dipengaruhi oleh cara dia memandang ke arah kebijakan perseorangan dan bagaimana mereka melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan kepentingan personel. Implementor sering tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan sering kali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi atau kerja dilingkungan disposisi implementor atau mencoba mengurangi kebijaksanaan implementor.

#### 4. Struktur birokrasi

Sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam struktur birokrasi fragmentasi organisasi boleh menjadi menghalangi koordinasi yang diperlukan dan implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerja sama (*corporation*) banyak orang, dan juga pemborosan

sumber daya yang langka merintangi perubahan, menciptakan kebingungan mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting tak terlupakan.

Peneliti menggunakan model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : *communication, resources, dispotitions and bureaucratic structure*.

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

Konsistensi, jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidak konsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil

tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya, Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi pun cenderung kurang efektif.

Sumber daya manusia merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (Staf) harus cukup dan cakap. SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Sumber daya anggaran, sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. sumber daya informasi dan Kewenangan, menurut Edward (Wahab,2016), ada dua bentuk informasi yang pertama informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya



agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Bentuk kedua yaitu informasi berupa data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap pemerintah.

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

## **F. Tinjauan Mengenai Program Premi Asuransi Nelayan**

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program bantuan premi asuransi nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPAN merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Nilai manfaat per-orang berupa santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian seorang nelayan (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2016), Program jaminan perlindungan atas risiko nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016. Landasan tersebut, KKP akan terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para Nelayan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-Djpt/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, adapun Tujuan Pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Persyaratan Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan, Mekanisme Proses Klaim, Penanganan Tuntutan/Klaim, Keputusan Tuntutan/Klaim Dan Pembayaran Tuntutan/Klaim adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Pemberian BPAN sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan datang
2. Menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi
3. Membangun keinginan nelayan untuk turut serta berasuransi secara mandiri
4. Memberikan bantuan bagi ahli Waris
5. Memindahkan Risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak asuransi.

b. Persyaratan NP-BPAN meliputi:

1. Memiliki Kartu Nelayan/Kartu KUSUKA yang masih berlaku.
2. Bagi yang belum memiliki kartu atau sudah memiliki Kartu Nelayan tetapi telah habis masa berlakunya, wajib melampirkan bukti Formulir Pendaftaran Pelaku Usaha Perorangan.

3. Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
  4. Berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2018
  5. Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan
  6. Tidak sedang mendapatkan BPAN dari Pemerintah Daerah dengan Risiko yang dijamin sejenis.
  7. Tidak pernah mendapatkan BPAN dari kementerian lainnya dan/atau Pemerintah Daerah atau pernah mendapatkan bantuan premi asuransi, namun Polis Asuransi Nelayan telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda.
  8. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  9. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.
  10. Mendaftar melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id). Dalam hal tidak mampu mengakses laman dimaksud, maka dapat difasilitasi pendaftarannya oleh Petugas Pendamping/Dinas/Direktorat.
- c. Tata Kelola Pencairan Dana BPAN
1. Organisasi Pelaksana Dalam pelaksanaan kegiatan BPAN, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Petugas Pedamping dan Penanggung.

a). Kementerian Kementerian dalam hal ini meliputi Direktorat dan Pusdatin.

1) Direktorat mempunyai tugas:

- i. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
- ii. Melakukan sosialisasi kegiatan bersama-sama dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota bagi NCP-BPAN.
- iii. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka penetapan Penanggung.
- iv. Melakukan update database kenelayanan bersama-sama dengan Pusdatin.
- v. Melakukan input ke laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id) untuk data:.
  - 1) petunjuk teknis bantuan pemerintah.
  - 2) pemohon yang mendaftar secara luring (offline).
  - 3) hasil verifikasi dan validasi.
  - 4) Surat Keputusan penetapan penerima bantuan.
  - 5) Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- i. Melakukan penetapan NP-BPAN
- ii. Melakukan pembinaan dan monitoring baik kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota serta Penanggung.
- iii. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

2) Pusdatin Mempunyai Tugas

- i. Melakukan update database kenelayanan bersama-sama dengan Direktorat.
  - ii. Memberikan akses database kenelayanan kepada Penanggung.
- b. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
- 1) Dinas Provinsi mempunyai tugas.
    - i. Mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan BPAN
    - ii. Menetapkan Petugas Pendamping berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) orang.
    - iii. Melakukan sosialisasi bersama-sama Direktorat dan Dinas Kabupaten/Kota kepada petugas pendamping dan nelayan.
  - 2) Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
    - i. Mengusulkan pegawai ke Dinas Provinsi untuk ditetapkan menjadi Petugas Pendamping.
    - ii. Melakukan pendampingan kepada nelayan oleh petugas pendamping dalam hal pendaftaran melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id)
    - iii. Melakukan validasi Nelayan Calon Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (NCP-BPAN)
    - iv. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

c. Petugas Pendamping Petugas Pendamping mempunyai tugas:

- i. Memberi pendampingan apabila diperlukan kepada NCP-BPAN untuk mendaftarkan diri melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id).
- ii. Dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman di atas, mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Direktorat melakukan input data ke dalam laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id).
- iii. Melakukan identifikasi dan verifikasi NCP-BPAN bersama-sama Penanggung.
- iv. Membuat rekapitulasi hasil verifikasi NCP-BPAN sebagai bahan usulan validasi Dinas Kabupaten/Kota.

d. Penanggung Penanggung mempunyai tugas:

- i. Melaksanakan perjanjian BPAN sesuai dengan nilai, jumlah penerima, waktu, dan penyaluran pertanggung kepada Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan ( NP-BPAN).
- ii. Melakukan identifikasi dan verifikasi NCP-BPAN bersama-sama Petugas Pendamping.
- iii. Melakukan koordinasi dengan Direktorat, Pusdatin, dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- iv. Melakukan publikasi baik melalui media cetak (brosur, poster, leaflet, banner dan lain-lain) maupun media elektronik.

- v. Melakukan sosialisasi kegiatan BPAN bersama-sama dengan Direktorat, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
  - vi. Menerbitkan Polis Induk, Polis Realisasi (PR) dan Kartu Asuransi Nelayan) KAN termasuk pendistribusiannya ke Dinas Kabupaten/Kota serta melaksanakan pembayaran pertanggungan.
  - vii. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan BPAN setiap bulan yang dilengkapi dengan fotokopi tanda bukti pembayaran Manfaat kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan
1. Berdasarkan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggung, maka Penanggung akan menerbitkan Polis Induk.
  2. Penanggung berkoordinasi dengan Direktorat dan Pusdatin untuk mendapatkan database Kartu Nelayan yang nantinya dijadikan acuan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi NCP-BPAN..
  3. Penanggung dan Petugas Pendamping melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan dan selanjutnya divalidasi. Hasil validasi dicantumkan dalam Berita Acara (BA) Validasi NCP-BPAN yang selanjutnya diusulkan dari Dinas Kabupaten/Kota ke Direktur.
  4. Berdasarkan BA (Berita Acara) Hasil Validasi tersebut, PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan NP-BPAN dan disahkan oleh KPA. Surat Kerja (SK) Penetapan tersebut disampaikan kepada Penanggung.



5. Penanggung menerbitkan Polis Realisasi dan KAN sesuai dengan SK Penetapan NP-BPAN.
  6. Penanggung menyampaikan Polis Realisasi dan fotokopi KAN kepada Direktur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST),.
  7. Penanggung menyampaikan fotokopi Polis Realisasi dan KAN kepada Dinas Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam BAST sebagaimana.
  8. Berdasarkan BAST yang didukung dengan dokumen lainnya, Penanggung mengajukan penagihan pembayaran premi asuransi kepada Direktur selaku PPK.
- e. Mekanisme Proses Klaim Bantuan Premi Asuransi Nelayan
- a) Pengajuan Klaim Pengajuan Tuntutan/Klaim oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Penanggung diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan kepada Tertanggung dalam hal:
    1. Dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan/hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
      - i. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, dari Pihak Tertanggung melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau polisi perairan setempat.

- ii. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian di Laut/Darat.
  - iii. Khusus untuk kejadian hilang berdasarkan pernyataan syahbandar/polisi perairan setempat pada saat melakukan kegiatan di laut atau perairan darat, Ahli Waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan Manfaat apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.
2. Dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan akibat selain kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
- i. Klaim untuk kematian alami hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan sejak Polis Realisasi diterbitkan.
  - ii. Masyarakat, keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepada kepala desa/lurah setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar.
  - iii. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Kejadian.
- b) Berdasarkan Berita Acara Kejadian yang dibuat oleh syahbandar/polisi perairan setempat, selanjutnya keluarga, Ahli Waris, dari Pihak Tertanggung melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- c) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan Klaim kepada Penanggung kantor cabang terdekat yang tembusannya disampaikan ke Direktur dan Kepala Dinas Provinsi
- d) Selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:

1) Dokumen Umum

- i. Berita Acara Kejadian (BAK)
- ii. Pengajuan klaim telah diisi lengkap dan ditandatangani
- iii. Fotokopi KAN
- iv. Fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap.
- v. Fotokopi KTP dan/atau fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris akibat kematian/hilang di laut.
- vi. Surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat apabila Ahli Waris tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada huruf

2) Dokumen Khusus

- a. Klaim kematian akibat kecelakaan atau akibat hilang di laut atau lainnya:
  - i. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas atas kekerasan/tindak kriminal
  - ii. Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila kematian di rumah sakit atau klinik)

- iii. Surat pernyataan kronologis kejadian dari ahli waris harus bermaterai dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW)
  - iv. Surat/akta kematian (kutipan akte kematian) dari instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Tuntutan/Klaim Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
- i. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian.
  - ii. Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap/cacat total.
- c. Tuntutan/Klaim Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan
- i. Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian
  - ii. Kuitansi asli biaya pengobatan dari Rumah Sakit/Klinik berikut rinciannya untuk klaim biaya pengobatan.
- f. Penanganan Tuntutan/Klaim
1. Penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak Dokumen Klaim lengkap.
  2. Berdasarkan proses pengajuan klaim, Penanggung dan Dinas Kabupaten/Kota segera memproses Manfaatnya dan diberikan kepada Ahli Waris jika Tertanggung mengalami kematian.

3. Apabila Tertanggung mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan diberikan kepada Tertanggung.

g. Keputusan Tuntutan/Klaim

1. Berdasarkan hasil verifikasi klaim, Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) yang ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung/Ahli Waris selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.
2. Jika dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kecelakaan diterima oleh Penanggung dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum terbit BAKK, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap tuntutan/klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Ahli Waris.

h. Pembayaran Tuntutan/Klaim

1. Pembayaran klaim dilakukan pihak Penanggung berdasarkan BAKK.
2. Manfaat klaim wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke rekening Tertanggung/Ahli Waris setelah tanggal penandatanganan BAKK; dan c. fotokopi bukti pembayaran Manfaat disampaikan kepada PPK.

## **G. Kerangka Pikir**

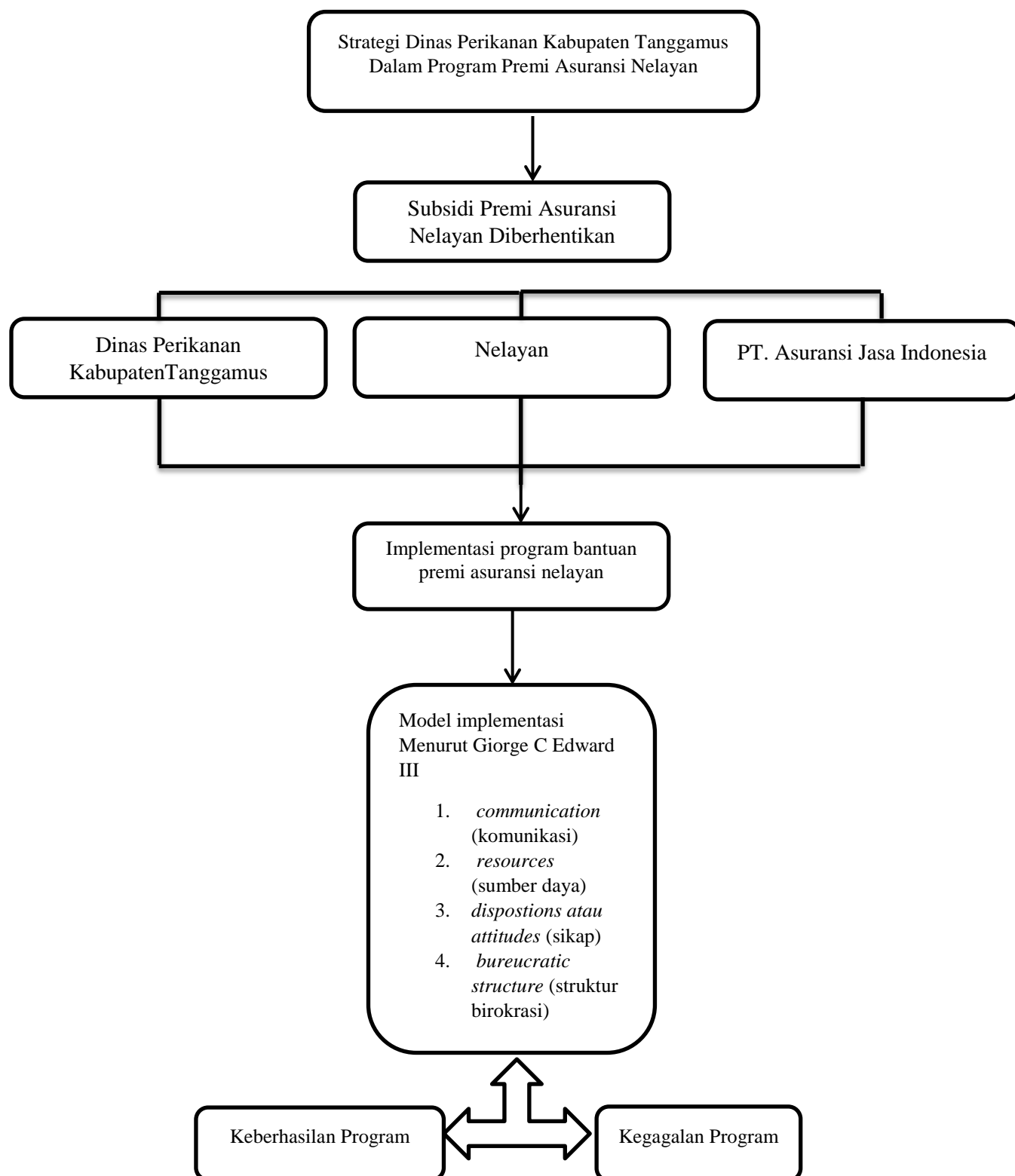
Program premi asuransi nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Tujuan pemberian BPAN memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang. Pelaksanaan program premi asuransi nelayan di Kabupaten Tanggamus tidak berjalan seperti yang diharapkan

Tabel 1 dan 2 pada Bab I halaman 4 dan 5 tentang Penerima Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Provinsi Lampung Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan peserta program asuransi 2016 sampai 2018 mengalami penurunan. Tahun 2016 Program Premi Asuransi Kabupaten Tanggamus menjadi peserta dengan jumlah tertinggi karena pada tahun 2016 premi asuransinya masih ditanggung oleh pemerintah. Tahun 2017 Kabupaten Tanggamus berada di posisi tertinggi kedua setelah Lampung timur. Tahun 2018 hanya 190 nelayan yang menjadi peserta asuransi. Sistem dari bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan premi asuransi nelayan hanya diberikan satu periode saja lalu pada periode selanjutnya nelayan membayarkan secara mandiri premi asuransinya tersebut.

Penelitian ini memaparkan Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak

Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan nelayan yang mandiri, kementerian kelautan dan perikanan mencanangkan bahwa program bantuan premi asuransi nelayan hanya berlaku satu tahun keikutsertaan. Setelah masa berlaku habis nelayan wajib membayarkan secara pribadi premi asuransi tersebut. Pencabutan subsidi tersebut bertujuan agar nelayan mengikuti program asuransi mandiri dan nelayan sadar akan betapa pentingnya berasuransi

Penelitian ini menggunakan Model implementasi Menurut George C Edward III untuk mengetahui implementasi program premi asuransi dengan melakukan pencabutan subsidi premi periode kedua setelah keikutsertaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus yang dirumuskan memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : *Communication, Resources, Dispositions And Bureaucratic Structure*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berfikir di bawah ini:



Gambar 1. bagan kerangka pikir



### **III. METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian pada bab ini adalah untuk menentukan cara atau langkah peneliti dalam menganalisis dan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian dan jenis penelitian, fokus penelitian, jenis data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Semua pembahasan tersebut akan didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam ilmu sosial.

Sugiyono (2016:2) menyatakan metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid atau data yang sesungguhnya. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

### A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian

Peneliti akan mendeskripsikan tentang suatu strategi yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif.

Sugiyono (2012:15) menyatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah bagian dari instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena sosial tertentu yang disekitarnya. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun oleh peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk-bentuk angka namun tertuang dalam bentuk kata-kata yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena sosial yang diteliti.

Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola-pola atas dasar aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan

mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

Melalui penelitian kualitatif penulis dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penulis juga diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Penelitian dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Tanggamus.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus yang beralamat di JL. Gatot Subroto No. 01 Komplek Pemda Tanggamus Kota Agung.
2. Kantor HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Tanggamus beralamat di JL. Harapan Pantai Laut Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kotagung Kabupaten Tanggamus
3. Masyarakat nelayan di Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus
4. PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor cabang Bandarlampung, JL. Raden Intam No. 84, Pelita Enggal, Kota Bandar Lampung.

## **C. Fokus penelitian**

Penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan masalah yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran orientasi kajian. Menurut Spradley (Sugiyono, 2016:208) fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian.

Fokus penelitian ini berfokus pada Model implementasi Menurut George C Edward III untuk mengetahui implementasi program premi Asuransi dengan

melakukan pencabutan subsidi premi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus yang dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi meliputi: kejelasan pesan atau cara penyampaiannya (media penyampaiannya), isi pesan dalam program itu tersampaikan ke nelayan, *feedback* atau respon nelayan terhadap program bantuan premi asuransi.

2. Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya informasi. Sumber daya manusia meliputi dua aspek yaitu pemerintah atau penyuluh dan nelayan. Aspek pemerintah atau penyuluh fokus penelitiannya tentang pelaksanaan premi asuransi nelayan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak, evaluasi programnya. Aspek yang kedua yaitu nelayan yang dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas nelayan dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan selain melaut.

Sumber daya finansial meliputi program yang dikeluarkan oleh dinas perikanan Kabupaten Tanggamus selain program premi asuransi nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kemandirian nelayan. Sumber daya informasi meliputi pendapatan nelayan perhari, informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus mengenai larangan-larangan mengenai penangkapan jenis-jenis ikan.

### 3. Sikap (*Dispotitions*)

Fokus penelitian pada sikap yaitu mengenai pencabutan asuransi. Alasan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus mencabut subsidi bantuan dan menurunkannya jumlah peserta asuransi.

### 4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Tentang kelebihan dan kendala mengenai pelaksanaan informasi tentang pelaksanaan program premi asuransi nelayan dari pusat ke daerah karena pada dasarnya program ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia akan tetapi yang menjalankan adalah pemerintah kabupaten. Serta hubungan kerjasama seperti apa yang dijalin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dan pihak Jasindo

## **D. Jenis Data**

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat sesuai dengan data yang diteliti di lapangan. Peneliti harus mencari data dari sumber utama, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Sarwono (2006:209) data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sample dalam penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari hasil wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan

yang merupakan Petugas pendamping bantuan premi asuransi nelayan tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, Ketua HNSI Kecamatan Kota Agung, perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) sebagai pihak ketiga dan pengelola asuransi, nelayan Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

## 2. Data Sekunder

Sarwono (2006:210) menyatakan bahwa data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah:

- a. Data bentuk teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk
- b. Data bentuk gambar: foto, animasi, billboard
- c. Data bentuk suara: hasil rekaman kaset
- d. Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi dll.

Penelitian ini perolehan data sekunder dapat berupa dokumen yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tentang jumlah usulan nelayan yang menerima program bantuan premi asuransi nelayan. Dokumen atau data dari website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai nelayan yang sudah terverifikasi bantuan program premi asuransi nelayan ditahun 2016 dan 2017.

Jumlah desa pesisir, jumlah nelayan, jumlah KUB, jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan di Kabupaten Tanggamus tahun 2017 yang didapatkan langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang didapatkan melalui website BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kabupaten Tanggamus, perubahan status kemajuan desa tahun 2014 Dan 2017 menurut Kabupaten/Kota yang di dapatkan melalui website resmi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Tanggamus, jumlah penduduk desa Pasar Madang, jumlah KK, jumlah masyarakat miskin yang didapatkan langsung dari Kantor Kelurahan Pasar Madang, jumlah nelayan yang didapatkan dari HNSI (Himpunan nelayan Seluruh Indonesia). Dokumen digunakan sebagai data pendukung agar dapat menjadi bukti dari data primer.

#### **E. Penentuan Informan**

Tresiana (2013:81) dalam setiap penelitian akan selalu membutuhkan objek atau sasaran penelitian. Dimensi penting dalam pengumpulan data yang harus menjadi fokus perhatian adalah pertama, bagaimana objek/sasaran dapat dipastikan memiliki data/informasi yang dibutuhkan. Kedua, setelah objek/sasaran ditetapkan, selanjutnya adalah bagaimana atau dengan cara apa informasi/data digali sehingga dapat diperoleh data sesuai kebutuhan. Hal pertama berkenaan siapa sampel/informan yang tepat dan hal kedua berkenaan dengan tehnik atau cara dalam penentuan sampel/informan.



Sampel sendiri merupakan istilah yang sangat lazim dipakai pada penelitian kuantitatif, tetapi dalam tradisi penelitian kuantitatif, sampel itu juga dikenal dengan istilah informan. Penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *convenience sampling* (sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan ketepatan). *Convenience sampling* merupakan non probabilitas sampel. Tidak bisa menggeneralisasikan populasi sebagaimana sampel pada penelitian kuantitatif. Sampel ini didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Kekuatan sampel purposif terletak pada pemilihan kasus-kasus yang kaya informasi untuk studi mendalam. Memilih orang (informan) memungkinkan peneliti mempelajari isu netral. Ada empat tujuan digunakannya sampel purposif:

1. Mencapai keterwakilan (*representativeness*) dari *setting*, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.
2. Menggambarkan secara memadai heterogenitas populasi
3. Memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang dijadikan acuan studi
4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara *setting* dan individu

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik *purposive sampling* Alasan peneliti memilih dalam penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* adalah dengan pertimbangan tersebut, informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan

peneliti menjelajah objek yang diteliti. Menurut peneliti metode pengambilan sampel sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

**Tabel 10. Daftar Informan**

No	NAMA	Jabatan
1	Edi Yulian S.E	Kasubbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum Dan Kepegawaian
2	A'an Junaidi, S.Pi, M.M.	Petugas Pendamping BPAN Kabupaten Tanggamus dan Kepala Seksi Pengawasan Perairan Umum
3	Tobing Sutomo, A.Pi	Petugas Pendamping BPAN dan Koordinator Penyuluh perikanan
4	Jefri Almariski, A.Md	Penyuluh Perikanan Kecamatan Kota Agung
5	Suyudi	Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kecamatan Kota Agung
6	Mahdis	Kepala Bidang Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia
7	Titus Laksa Gemilang	Marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia
8	Marofi	Masyarakat nelayan Peserta program bantuan premi asuransi nelayan dan nelayan Desa Pasar Madang RT 14
9	Satibi	Masyarakat nelayan Peserta program bantuan premi asuransi nelayan dan nelayan Desa Pasar Madang RT 09
10	Ahmad Syahroni	Masyarakat nelayan bukan peserta program bantuan premi asuransi nelayan Desa Pasar Madang dan nelayan RT 10
11	Misna	Masyarakat nelayan bukan peserta program bantuan premi asuransi nelayan Desa Pasar Madang dan nelayan RT 14
12	Edwin	Nelayan Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
13	Pengsan	Peserta Klaim Asuransi Nelayan Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung
14	Hamzah	Peserta Klaim Asuransi Nelayan Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung

Sumber : diolah oleh peneliti (2018)

Alasan peneliti fokus pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus karena Dinas Perikanan diberi wewenang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan pendataan, pendaftaran dan

sosialisasi mengenai bantuan program premi asuransi nelayan karena Dinas Perikanan Kabupaten yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Alasan peneliti untuk fokus pada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan, berdasarkan hasil Pra-Riset yang dilakukan peneliti di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam pengimplementasian program bantuan program asuransi nelayan dibantu oleh HNSI kabupaten, HNSI Kecamatan. Serta fokus peneliti pada nelayan di Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung sebagai informannya. Pihak PT. Jasa Asuransi Indonesia sebagai pihak ketiga penyelenggara asuransi dan nelayan yang pernah melakukan klaim asuransi program bantuan premi asuransi nelayan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:224) sebagai berikut:

##### **1) Wawancara**

Penelitian ini salah satu teknik yang dipakai dalam teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Sugiyono (2016:233) menyatakan wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau pada keyakinan pribadi.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang artinya peneliti akan memperoleh dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh karena dalam wawancara terstruktur ini peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau panduan wawancaranya.

## 2) Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Sugiyono (2016:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tentang jumlah usulan nelayan yang menerima program bantuan premi asuransi nelayan. Dokumen atau data dari website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai nelayan yang sudah terverifikasi bantuan program premi asuransi nelayan ditahun 2016 dan 2017, jumlah desa pesisir, jumlah nelayan, jumlah KUB, jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan di Kabupaten Tanggamus tahun 2017 yang didapatkan langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang didapatkan melalui website BAPPEDA kabupaten Tanggamus, perubahan status kemajuan desa tahun 2014 dan 2017 menurut kabupaten/kota yang di dapatkan melalui website resmi BAPPEDA Tanggamus, jumlah penduduk desa Pasar Madang, jumlah KK, jumlah masyarakat miskin yang didapatkan langsung dari Kantor Kelurahan Pasar Madang, jumlah nelayan yang didapatkan dari HNSI. Dokumen digunakan sebagai data pendukung agar dapat menjadi bukti dari data primer

### 3) Observasi

Penelitian ini, peneliti melakukan observasi. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka,

peneliti memilih observasi partisipan. Sugiyono (2016:227) Observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Oleh sebab itu, peneliti memilih teknik observasi partisipan karena dengan teknik ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah peneliti mendapatkan hasil data dilapangan, maka peneliti melakukan pengolahan data. Tehnik pengolahan data menurut Emzir (2011:29) terdiri dari:

#### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak

relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

## 2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan untuk dapat memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

## H. Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:337) yang meliputi:

### a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila akan diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan serta proses penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

### b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

### c) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam



kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan pengambilan intisari, dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

### **I. Teknik Keabsahan Data**

Tresiana (2013:142) untuk menjaga kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesalahan dan perlunya tindakan *urgent* peneliti untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu).

Penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menetapkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data *creadibbility* atau uji derajat kepercayaan. *Credibility* (Derajat Kepercayaan) mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Untuk menguji *Credibility* peneliti hanya melakukan triangulasi data.

## 1. Triangulasi

Tresiana (2013:147) Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekn atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik triangulasi :

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu  
Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu yang berbeda.

Peneliti menggunakan triangulasi data di mana peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data di mana teknik-teknik itu untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan atau tidak. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil wawancara dari sumber pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

- 3) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.
- 4) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan hasil dokumentasi.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus**

Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus terletak di Jalan Gatot Subroto No. 01 Komplek Pemda Tanggamus Kota Agung Provinsi Lampung Kode Pos 35384 Telpn (0722) 21853. Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1. Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perikanan**

##### **a. Tugas pokok Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan pada kabupaten..

## I. Fungsi Dinas Perikanan

Fungsi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman dibidang perikanan;
- b) Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar daerah;
- c) Penyediaan dukungan dan pemanfaatan bidang perikanan;
- d) Pemberian izin dibidang perikanan;
- e) Perumusan kebijakan teknis perikanan;
- f) Pelatihan dan penelitian dibidang perikanan.
- g) Pengelola ketatausahaan.

## II. Rincian Tugas dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus

Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari.

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya meliputi teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan yang meliputi Perikanan Tangkap dan

Pengawasan, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten, antar lembaga/instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Perikanan.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan
2. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan
3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
4. Pengelolaan urusan keuangan

5. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi , Sekretariat dibantu oleh :

- I. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum dan Kepegawaian
- II. Sub Bagian Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- I. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a) Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas
  - b) Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas
  - c) Menghimpun dan menyusun pelaporan program dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja Dinas
  - d) Menghimpun serta menyimpan data dan informasi program dan kegiatan Dinas
  - e) Mengumpulkan hasil validasi data produksi baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam bentuk buku Laporan Tahunan Perkembangan Perikanan Kabupaten Tanggamus
  - f) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan informasi

- g) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas
- h) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
- i) Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan Umum dan Kepegawaian;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

II. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a).Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadminitrasian gaji dan perjalanan dinas
- b) Melakukan pengelolaan urusan aset
- c) Melaksanakan pembukuan, pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset
- d) Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan2.

c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah



Kabupaten di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan;
- b) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perikanan Tangkap dan Pengawasan
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Perikanan Tangkap dan Pengawasan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan dibantu oleh :

- a) Seksi Perikanan Tangkap
- b) Seksi Pengawasan Perairan Umum

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan Budidaya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya

- b) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Perikanan Budidaya
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perikanan Budidaya
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Perikanan Budidaya
- e) Perancangan, pengembangan dan pemberdayaan Perikanan Budidaya
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- g) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- h) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh :
  - a) Seksi Budidaya Air Tawar.
  - b) Seksi Budidaya Air Payau dan Laut.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

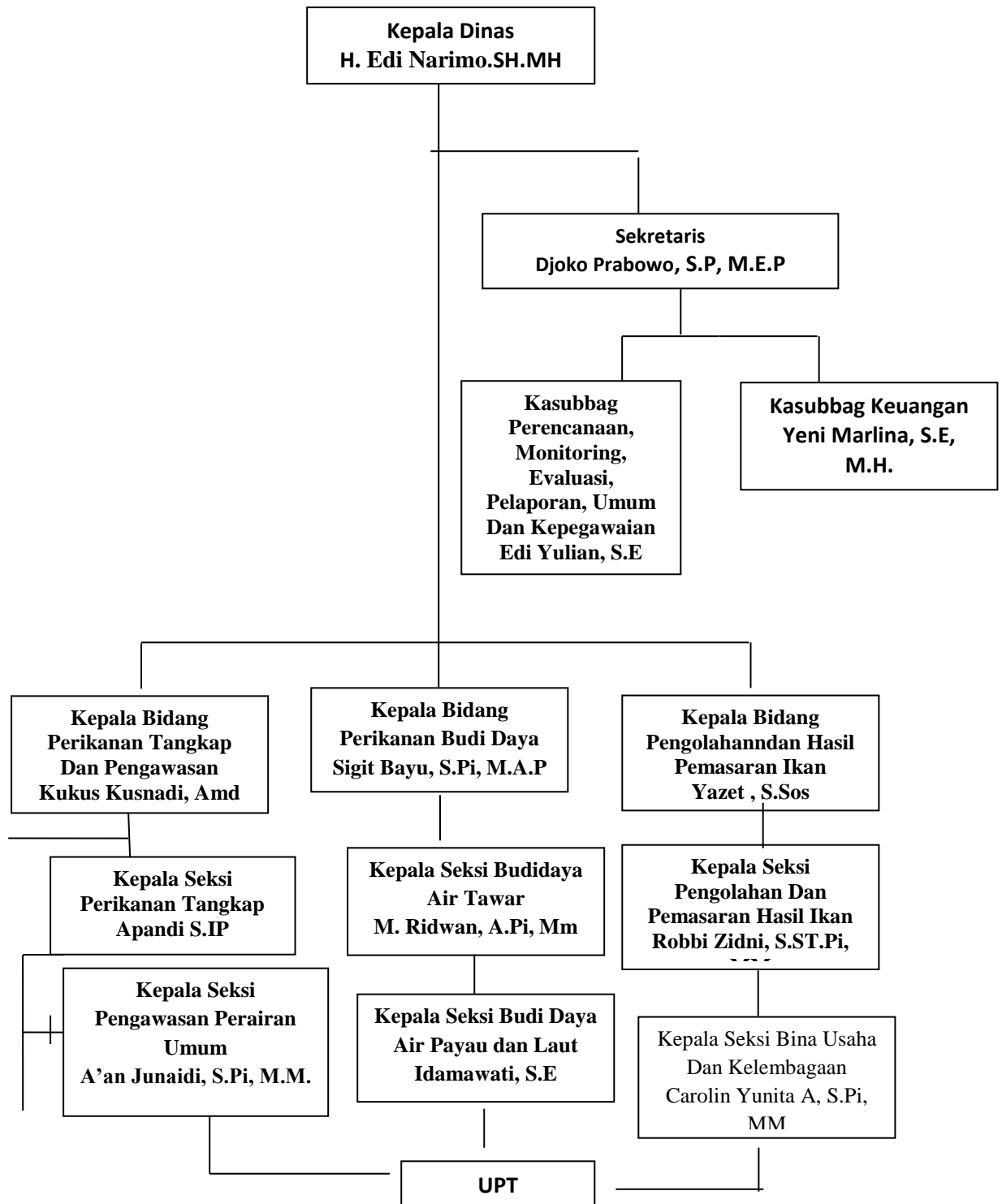
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- b) Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c) Penentuan standar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lingkup Pemerintah Kabupaten
- d) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibantu oleh :

- a) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
- b) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus (2018)

## 2. Visi dan Misi Dinas Perikanan

### I. Visi

Visi menterjemahkan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus harus dibawa dan berkarya agar dapat konsisten dan dapat eksis, atraktif, inovatif dan produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran keadaan kedepan yang diinginkan Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam jangka panjang. Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu : **Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul Dan Sejahtera “Pekon Sebagai Basis Untuk Kemandirian, Keunggulan dan Kesejahteraan”**.

Maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah dengan upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Adapun Visi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus adalah **“Pengelolaan Sumberdaya Perikanan secara Mandiri, Unggul dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Penjelasan Visi :

- a. Mandiri berarti mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Unggul berarti memiliki komoditi yang berdaya saing di sektor perikanan.
- c. Berkelanjutan berarti pemanfaatan berazaskan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

- d. Kesejahteraan berarti perekonomian yang tumbuh, maju dan berkembang.

## II. Misi

Misi mempersentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil. Adapun Misi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus adalah :

- a. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia sektor perikanan yang mandiri.
- b. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang unggul dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan produktivitas perikanan.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan sektor perikanan.

## 3. Keadaan Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dinas perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor sumber daya manusia aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tahun 2019 adalah sebanyak 30 PNS dan pekerja Non PNS berjumlah 53 jadi total keseluruhan pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus adalah 83 orang. Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan tersebut.

## B. Gambaran Umum Desa Nelayan Pasar Madang

Desa Pasar Madang merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kabupaten Tanggamus. Luas Daerah Pasar Madang adalah  $\pm$  4 hektar yang terdiri dari 4 lingkungan dan 16 RT. Desa Pasar Madang merupakan desa yang terletak di Pesisir Pantai Kota Agung. Desa Pasar Madang juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelabuhan kapal baik kapal nelayan maupun kapal sandaran pertamina, dan juga terdapat pelabuhan penyebrangan untuk penumpang yang ikan pergi ke daerah seberang. Berikut tabel jumlah penduduk dan profesi di Desa Pasar Madang

**Tabel 9. Jumlah Penduduk dan Profesi di Desa Pasar Madang**

No	Jumlah Penduduk di Desa Pasar Madang		Profesi Dan Jumlahnya	
	Laki-Laki	Perempuan	Profesi	Jumlah
1	3296	3095	Nelayan	1225
2			Pedagang	200
3			Pegawai Negeri Sipil	52
4			Petani	25
5			Buruh	175
<b>Total</b>	6391		1677	
<b>Jumlah penduduk desa pasar madang</b>			6391	
<b>Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Pasar Madang</b>			1677	

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Mayoritas penduduk Desa Pasar Madang adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Data yang diperoleh peneliti dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus jumlah rumah tangga nelayan untuk Desa Pasar Madang adalah 1225 dan jumlah KK di Desa Pasar Madang adalah 1677. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi pusat perdagangan ikan di Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu faktor yang di Desa Pasar Madang bermata pencaharian sebagai nelayan. Berikut klasifikasi Jumlah

Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Laut Menurut Kategori Besarnya Usaha di Desa Pasar Madang pada tahun 2018.

**Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Laut Desa Pasar Madang Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah	Tanpa Perahu/Buruh	Kategori Besarnya Usaha														
				Dengan Perahu Tanpa Motor						Dengan Motor Tempel	Dengan Kapal Motor							
				Sub Jumlah	Jukung	Perahu Papan			Ukuran Kapal Motor (GT)									
						Kecil	Sedang	Besar	Sub Jumlah		<5	5-10	10-20	20-30	30-50	50-100	100-200	>200
	Jumlah	1.225	548	13	13	-	-	-	218	446	-	341	65	-	40	-	-	-
1	Pasar Madang	1.225	548	13	13				218	446		341	65		40			

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nelayan di Desa Pasar madang bermayoritaskan nelayan kecil. jumlah terbanyak nelayan yang tidak memiliki perahu atau hanya sebagai ABK (anak buah kapal). Lalu jumlah tertinggi kedua yaitu nelayan yang memiliki kapal kecil 5-10 GT



## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dengan memberhentikannya subsidi Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada periode kedua setelah keikutsertaan disimpulkan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran. Nelayan kecil tidak merespon program bantuan premi asuransi nelayan ini akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang besar justru yang merespon dengan cepat program bantuan premi asuransi nelayan. Nelayan dengan penghasilan besar lebih diuntungkan dalam asuransi nelayan mandiri akan tetapi nelayan dengan penghasilan yang besar tidak mampu mengikuti lanjutan program asuransi nelayan mandiri.

Hasil analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Ketidakberhasilan implementasi strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dengan memberhentikan subsidi premi asuransi nelayan dalam pelaksanaan BPAN. Hasil mengenai model implementasi kebijakan George Edward III, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam ketidakberhasilan implementasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*. Kegagalan Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam implementasi program bantuan premi asuransi nelayan, dengan melakukan pencabutan subsidi tidak berhasil pengimplementasiannya. Dari empat variabel hanya satu variabel yang terpenuhi yaitu variabel struktur birokrasi. Sedangkan menurut Edward implementasi kebijakan akan berhasil apabila dari empat variabel dapat terpenuhi.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran terhadap strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam membangun kemandirian nelayan dengan mencabut subsidi premi asuransi nelayan periode kedua keikutsertaan dalam pelaksanaan program bantuan premi asuransi nelayan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Sebagai struktur pelaksana program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan), harus memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada target program, yaitu nelayan.
2. Dibentuknya tim khusus untuk meregulasi program bantuan premi asuransi nelayan agar program tersebut berjalan maksimal.
3. Dalam hal memberikan pelayanan yang baik, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus harus mampu meningkatkan kredibilitas institusi sehingga dalam menjalankan program-program selanjutnya dapat dipercaya kembali oleh masyarakat khususnya nelayan.
4. Penambahan jumlah penyuluh perikanan lapangan yang berkualitas maksimal satu penyuluh memegang satu Kecamatan agar program-program yang dicanangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dapat langsung disentuh oleh nelayan
5. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus memperhatikan aspek pengalokasian sumber daya baik manusia, finansial dan informasi untuk mewujudkan program yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ekowati, Masroro Lilik. 2005. *Perencanaan Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Pustaka Cakra, Surakarta. 127 hlm.
- Emzir. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Analisis Data*. Jakarta. Rajawali First.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta. 175 hlm.
- Mardikanto, Totok dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Salim, Abbas. 2007. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhartini, Rr dkk. (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. PT. LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Cv Andi Offset, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin. 2016. *Analisis kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.

### **Skripsi:**

Fadillah, M. Fariz. 2017. *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul*. (skripsi). UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 90 pp.

Yandri, Lara Indah. 2017. *Implementasi Program Asuransi Nelayan Dikota Pariaman*. (Tesis). Universitas Andalas. Padang.

Hanif, Refiananda Maulana. 2018. *Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan Di Kabupaten Tanggamus*. (Skripsi). Universitas Lampung. Lampung

### **Jurnal:**

Adam, Lukman. 2015. *Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia*. Jurnal Selat. Vol 22 no 2 hal 145-162.

Rani, marnia. 2016. *Asuransi Untuk Nelayan*. Jurnal Selat. Vol 4 no 1 hal 2579-5767.

### **Sumber lain-lain**

BAPPEDA. 2018. *Rapat Koordinasi Perencanaan Dalam Rangka penyusunan Program/Kegiatan Tahun 2019*. <http://bappeda.tanggamus.go.id/wp-content/uploads/2018/02/RAPAT-KOORDINASI-USULAN-SIMLARAS-2019-1.pdf>. Diakses pada 21 november 2018 pukul 20.44 WIB.

KKP.2018. *Bidang Kenelayanan DKP Bone, Sosialisasi Asuransi Mandiri Bagi Nelayan*. 23 Agustus 2018. <https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/5720-bidang-kenelayanan-dkp-bone-sosialisasi-asuransi-mandiri-bagi-nelayan> . Di akses pada 15 Februari 2019 pukul 15.48 WIB

KKP. 2016. *Daftar Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2016*. <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/12/PROGRAM-BANTUAN-PREMI-ASURANSI-BAGI-NELAYAN-TAHUN-2016.pdf>. Diakses pada 3 september 2018 pukul 20. 20 WIB.

KKP. 2017. *Daftar Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2017*. <http://www.djpt.kkp.go.id/read/daftar-penerima-bantuan-premi-asuransi-nelayan-tahun-2017>. Diakses pada 3 september 2018pukul 22.20 WIB.

KKP.2018. *Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-Djpt/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*. 1 januari 2018. [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/BANTUAN%20LANGSUNG%20PEMERINTAH/DITJEN%20TAGKAP/JUKNIS%20BPAN%202018\\_PREMI%20ASURANSI\\_3.pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/BANTUAN%20LANGSUNG%20PEMERINTAH/DITJEN%20TAGKAP/JUKNIS%20BPAN%202018_PREMI%20ASURANSI_3.pdf) diakses pada 29 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

Tanggamus, Radar. *Pengentasan Kemiskinan Jadi Fokus Pemkab.*  
<http://www.radartanggamus.co.id/2018/04/11/pengentasan-kemiskinan-jadi-fokus-pemkab/>. Diakses pada 21 November 2018 pukul 20.57 WIB.